KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		н	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 5 6 4			H.4 X Final		
		K H	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 15 034 618 7 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : RAMLAH								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		ık Jı	UMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01		8.621.800	8.621.800	0	5	431.090	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 135								
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 уууу								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor :								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
	nstansi Pemerintah	<u> </u>			0 0 0			
C.2 Nama In	2.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subu	nit Organisasi							
C.4 Tanggal	:	2	2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.5 Nama Penandatangan :		<u>H/</u>	HARI JUMADI					
C.6 Pernyata	2.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						benar dan telah saya	
			esuai dengan ketentuan yang ektronik sehingga tidak diperli	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	k mengatur bahwa do	kumen ini tela	ah ditandatangani secara	

5SEUZJDB